

Dengan adanya penelitian ini memberikan penjelasan terkait Pemerintah ingin melakukan penataan kota sesuai dengan himbauan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dengan adanya Malioboro sebagai Cagar Budaya maka Gubernur ingin mendaftarkan Kawasan Malioboro Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO. Oleh karena itu Pemerintah membuat kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro ke Teras 2. Berdasarkan kebijakan relokasi ini menjadi wewenang Dinas Kebudayaan dan Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana atas kebijakan relokasi ini. Wewenang ini diberikan oleh Gubernur DIY dimana Dinas Kebudayaan menjadi aktor utama dalam merumuskan kebijakan ini dan Unit Pelaksana Teknis sebagai pembantu pelaksana teknis dalam kebijakan relokasi ini. Adanya penelitian ini menarik untuk diteliti yang nantinya akan menjawab bagaimana kinerja kebijakan relokasi pemindahan Pedagang Kaki Lima dan memberikan saran untuk melakukan evaluasi kinerja kebijakan relokasi guna untuk menyempurnakan program Pemerintah untuk mencapai tujuan secara bersama secara adil untuk semua aktor yang menjalankan. Penelitian ini akan menggunakan teori evaluasi kinerja kebijakan dan kebijakan relokasi. Penelitian studi kasus akan digunakan dalam penelitian kualitatif dan data akan diolah menggunakan metode triangulasi. Penelitian ini menemukan bahwa adanya kebijakan relokasi salah satunya belum sesuai dengan rencana di awal yang dimana Pemerintah memberikan janji seperti ukuran lapak sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dimana tidak adil secara merata bagi Pedagang Kaki Lima. Selain itu Pedagang Kaki Lima merasa belum sejahtera dengan adanya relokasi ini karena salah satu misi dari Dinas Kebudayaan adalah mensejahterakan masyarakat sehingga membuat Pedagang Kaki Lima masih melakukan aksi demo. Adanya Teras 2 ini menjadi shelter sementara bagi Pedagang Kaki Lima karena nantinya 2025 Pemerintah akan melakukan relokasi yang terakhir yang terletak di belakang Mall Ramayana. Sehingga penelitian ini menyarankan melakukan evaluasi guna untuk menilai kinerja dalam melakukan kebijakan relokasi ini. Selain itu Pemerintah diharapkan adanya transparansi terkait kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Evaluasi Kebijakan Relokasi Pemindahan Pedagang Kaki Lima Malioboro Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Khusus Malioboro)

Indira Putri Romadhona, Ario Wicaksono

dimana berdiskusi untuk kebanyakan dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima sehingga Pedagang Kaki Lima mengikuti kebijakan dengan senang hati.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja Kebijakan, Kebijakan Relokasi dan Pedagang Kaki Lima



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Evaluasi Kebijakan Relokasi Pemindahan Pedagang Kaki Lima Malioboro Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Khusus Malioboro)

Indira Putri Romadhona, Ario Wicaksono

Keywords: Policy Performance Evaluation, Relocation Policy and Street Vendors.